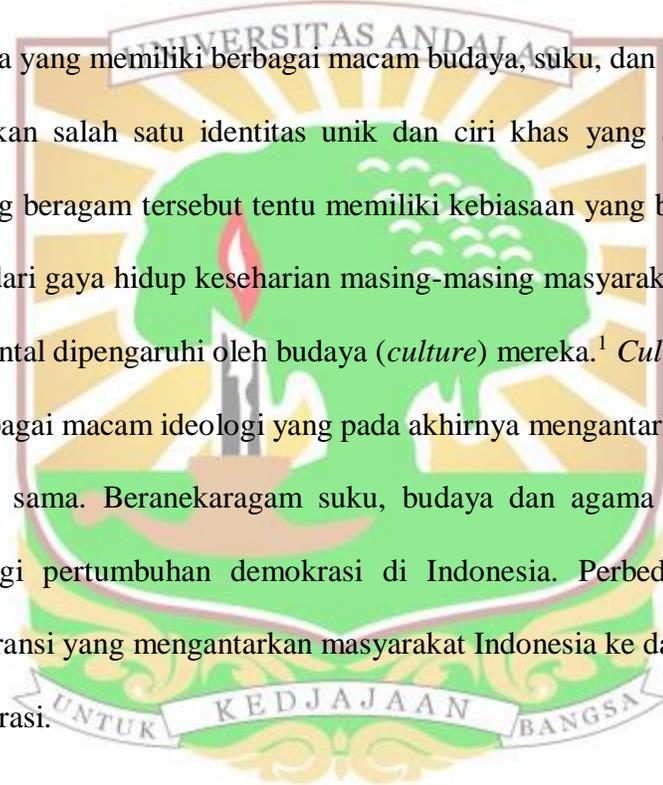


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku, dan agama yang mana hal ini merupakan salah satu identitas unik dan ciri khas yang ada di Indonesia. Masyarakat yang beragam tersebut tentu memiliki kebiasaan yang beragam pula. Hal ini bisa dilihat dari gaya hidup keseharian masing-masing masyarakat Indonesia yang masih sangat kental dipengaruhi oleh budaya (*culture*) mereka.¹ *Culture* yang berbeda melahirkan berbagai macam ideologi yang pada akhirnya mengantarkan kepada tujuan bernegara yang sama. Beranekaragam suku, budaya dan agama tidaklah menjadi penghambat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Perbedaan justru dapat melahirkan toleransi yang mengantarkan masyarakat Indonesia ke dalam payung yang bernama demokrasi.



Demokrasi itu sendiri merupakan bentuk sistem pemerintahan yang salah satu cirinya yakni, dengan partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam mengawal pemerintahan negara.² Memilih pemimpin politik dengan mekanisme

¹ Pengertian kebudayaan secara terminologi dalam berbagai bahasa memiliki beberapa makna yaitu *cultuur* dalam bahasa Belanda dan *culture* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah budaya. Sementara kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yakni *colere* artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Hal-hal terkandung di dalam kebudayaan contohnya, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat-istiadat serta kemampuan yang diadaptasikan dari lingkungan (Lihat Tylor, *Primitive Culture* 1871, bandingkan dengan Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan* 1974, dan Harris, *Theories of Culture in Postmodern Times* 1998).

² Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Kendali rakyat dan kesetaraan politik menjadi hal paling fundamental dalam prinsip demokrasi (Lihat Beetham, *Democracy and Human Rights* 1999). Prinsip dasar Demokrasi tersebut memiliki pengembangan makna yang kemudian memiliki turunan gagasan yang mengutamakan hak dan persamaan dan kewajiban, serta perlakuan yang sama, tanpa terkecuali, untuk semua warga negara.

tertentu merupakan salah satu cara yang diatur oleh demokrasi (H. Nugroho, 2015). Tonggak utama dalam mendukung sistem pemerintah yang demokratis adalah melalui Pemilihan umum (Pemilu). Demokrasi bisa dipahami dan dimengerti hanya dengan pembekalan politik yang matang, dengan cara pendidikannya secara langsung, terbuka dan massal (Haris, 2014).

Dalam sistem demokrasi salah satu instrumen paling penting adalah partai politik, yang bahkan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan sosial politik. Hal ini menyebabkan peranan partai politik menjadi sangat krusial karena sebagai kendaraan politik yang tak tergantikan oleh organisasi manapun (Meyer, 2012). Bahkan dalam perkembangan demokrasi partai politik masih memiliki peranan penting. Partai politik dalam sistem politik di Indonesia berfungsi sebagai pilar penguat demokrasi (Natalia, 2015). Peranan penting ini tentu berkaitan dengan ideologi dari partai tersebut yang sesuai dengan bentuk partai. Karena ideologi sangat mempengaruhi kemajuan maupun kemunduran demokrasi.

Ideologi tersebut pun memiliki hubungan yang erat dengan awal pendirian partai politik yakni sebagai penguatan kelembagaan partai serta tujuan dan fungsi partai yang akan merujuk kepada ideologi. Jika melihat sejarah pembentukan partai politik di dunia juga sangat kental dengan kehadiran ideologi yang kuat. Sementara itu dinamika politik di Indonesia juga tidak bisa lepas dengan kehadiran partai politik. Partai politik

Yang kemudian secara norma disebutkan dalam UUD 45 Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat (Lihat Undang-Undang Dasar 1945). Lalu bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat tersebut adalah pemilu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945 (Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E).

merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik (Direktorat Politik dan Komunikasi, 2016). Keberadaan partai politik yang sangat banyak tentu saja memiliki ideologi partai yang berbeda-beda.³ Namun setelah era reformasi, pemetaan ideologi politik di Indonesia menjadi rancu dan sangat sulit untuk dilakukan jika hanya berdasarkan spektrum kiri dan kanan.⁴

Jatuhnya rezim orde baru menjadikan beralihnya sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Hal ini tentu membuat banyak perubahan dalam berbagai aspek di Indonesia. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai politik (Romli, 2011). Pembentukan parpol sewaktu awal era reformasi mencapai 184 partai, kemudian badan hukum memberikan legalitas atau pengesahan kepada 141 partai politik tersebut. Pembentukan partai politik yang sangat

³ Ideologi politik bisa dilihat berdasarkan era yang sesuai dengan tokoh-tokoh politik maupun akademisi. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an pemetaan ideologi menurut kalangan politisi yakni Soekarno (1964) membagi ideologi yang ada dalam partai politik berakar pada Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok Agama ada Masyumi dan NU, sementara Komunis ada PKI sebagai representasinya (Lihat Nurjaman, Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia, 2009). Lalu dari kalangan akademisi seperti Feith dan Castles (1988) memberikan penjelasan yang lebih kompleks terhadap pemetaan ideologi politik di Indonesia tahun 1950-an. Kemudian melabeli pembagian tersebut dengan istilah “Sungai Budaya” yakni, PNI yang berhaluan Nasionalisme Radikal, Jawa Tradisional ada PNI-PKI-NU, kemudian berhaluan Islam seperti NU dan Masyumi, Sosialisme Demokratis yang diisi oleh PNI dan Masyumi, lalu ada PKI dengan haluan Komunisnya. Hal ini lah yang mendasari terbentuknya lima (5) aliran ideologi di Indonesia yaitu, Islam, Nasionalisme Radikal, Sosialisme, Komunisme dan Jawa Tradisional (Lihat Feith & Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, 2007).

⁴ Dhakidae dalam bukunya “*Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*” (1999) memberikan penjelasan tentang terbaginya masyarakat ke dalam 4 kelompok pasca reformasi yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD) (Lihat Dhakidae, Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, 2004).

banyak ini salah satu bentuk euforia kebablasan dalam menyambut kebebasan dari belenggu negara selama tiga puluh dua tahun. Dalam pembentukan partai politik ada beberapa hal mendasar yang sangat penting untuk diperhatikan yakni; (1) tujuan pendirian partai; (2) visi dan misi partai; dan (3) ideologi partai.⁵

Ideologi sendiri berada pada tingkatan abstraksi yang efeknya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, dan implementasinya memiliki keterkaitan dengan kebudayaan dan kebiasaan kelompok manusia tertentu. Sementara ideologi dalam partai politik juga menjadi permasalahan yang sangat krusial, yang akan menjadi pedoman dan tumpuan bagi partai politik dalam mencapai tujuannya. Namun, perihal ideologi terhadap partai-partai yang ada di Indonesia sesungguhnya nyaris sulit dibedakan. Perbedaan ideologi menjadi samar sehingga satu-satunya keterbelahan yang jelas dalam dunia kepartaian Indonesia adalah sebesar apa peran Islam dalam mempengaruhi aktivitas partai tersebut (Aspinall et al., 2018).

Walaupun Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, namun pada dasarnya hal itu tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Islam Indonesia bergerak ke arah lebih konservatif dari masa ke masa, yang mana mempengaruhi berbagai aspek kehidupan orang Islam sebagai mayoritas. Kelompok Islam konservatif mendorong implementasi ideologi Islam baik secara normatif

⁵ Lihat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 4 yang mengatur tentang Anggaran Dasar (AD) partai politik mencakup tentang: (1) asas dan ciri Partai Politik; (2) visi dan misi Partai politik; (c) nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik; (d) tujuan dan fungsi Partai Politik; dst... Pada poin (c) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik, dan hal ini bisa diartikan sebagai simbol-simbol Partai Politik yang mana menjadi penjabaran definisi ideologi. Rujukan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 4 yang mengatur tentang Anggaran Dasar (AD) partai politik).

maupun secara legal, misalnya dalam bentuk undang-undang (UU) atau peraturan daerah (perda) (Arditya, 2020). Kemudian kelompok konservatif ini melakukan cara-cara yang sangat demokratis dalam melakukan aksinya. Kelompok konservatif di Indonesia merupakan kekuatan politik yang signifikan.

Kelompok konservatif terbagi atas dua jenis yaitu, pertama; kelompok dengan kecenderungan religius yang kuat. Kelompok ini contohnya seperti PKS, PBB dan simpatisannya (Syah, 2018). Kedua; yang lebih condong kepada sifat-sifat nasionalis, contohnya Gerindra dan Golkar (Syah, 2018). Namun sejatinya apabila dikelompokkan menurut ideologi partai, di Indonesia posisi ideologi Partai Konservatif itu sendiri sesungguhnya memiliki posisi yang tidak jelas namun lebih dekat kepada Islam. Hal ini berbeda dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika yang eksistensinya sangat jelas.⁶ Karena beberapa faktor inilah konservatisme sangat dipengaruhi oleh sosio kultural suatu wilayah di berbagai negara. Kemudian yang menjadikannya sangat

⁶ Di Eropa Timur adanya bentuk perlawanan terhadap ancaman yang dimunculkan oleh kalangan kiri dan komunis menjadi *concern* bagi partai-partai Konservatif. Hal ini menjadikan Partai Konservatif di sana terkenal otoriter atau mendukung sistem otoritarianisme. Sementara di Eropa Barat, Partai Konservatif seperti RPR Perancis dan Demokrat Kristen Jerman memfokuskan dan memusatkan kebijakan-kebijakannya pada aspek pembangunan ekonomi, yang menjadikan Partai Konservatif di wilayah Eropa Barat cenderung lebih demokratis, dan membuat sebagian besar Partai Konservatif Eropa sudah bergerak dalam koridor demokratisasi. Kemudian perubahan-perubahan bentuk dari otoritarianisme menuju lebih demokratis dan memfokuskan pada kegiatan sosial dan politik yang menonjolkan aspek nasionalisme, penguatan militer, implementasi hukum nasional, kerukunan beragama, stabilitas sosial dan nilai-nilai keluarga. Akibat intervensi yang dilakukan oleh negara terutama pada aspek ekonomi, sehingga pada tahun 1980-an menyebabkan terjadinya pergeseran aliran konservatif di banyak wilayah di negara-negara Eropa. Pemberlakuan pajak yang tinggi juga inflasi besar-besaran yang akhirnya membawa revolusi terhadap konservatif tersebut, yang mana diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris saat itu Margareth Thatcher yang memaksa pemerintahan di wilayah Eropa Barat harus memangkas pengeluaran dan pembiayaan kesejahteraan. Berbeda dengan di Amerika Latin, Partai Konservatif merupakan representasi dari kelompok elit. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari kelompok konservatif ini dipimpin oleh para elit tradisional, yang jelas lebih berpihak kepada borjuis dibanding kaum proletar. (Lihat Marcus E. Ethridge dan Howard Handelman, *Politics in a Changing World: A Comparative Introduction to Political Science*, 2010).

kontras berbeda dimasing-masing negara disebabkan oleh beberapa aspek, seperti agama, adat, kebudayaan dan sejarah. Sementara partai non-konservatif di Indonesia mengacu kepada partai nasionalis yang lebih progresif.

Ideologi pada dasarnya memiliki pembagian posisi spektrum, lalu perbedaan posisi spektrum politik menentukan perbedaan terhadap masing-masing nilai yang dianut dan kemudian menjadi idealisme dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Sementara kelompok konservatif memiliki pendirian dan prinsip yang kuat dalam penerapan idealismenya yang terlihat dari beberapa aspek, yakni melalui ciri khas dan kebiasaan mereka, isu apa yang mereka mainkan, lalu “*concern*” terhadap hal-hal yang mendukung idealisme mereka. Hal tersebut melahirkan penentangan dan penolakan menjadi biasa mereka lakukan apabila ada suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung. Oleh karenanya idealisme ideologinya menjadi salah satu aspek fundamental bagi mereka dalam bersikap dan berperilaku.

Sebagai contoh dalam hal ini terlihat dari peristiwa politik yang terjadi pada rentang periode tahun 2014 hingga tahun 2019, bagaimana kelompok konservatif menjadi sebab kekalahan Presiden Jokowi di beberapa daerah yang kuat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tersebut, terutama kelompok konservatif agama. Kurang adanya kedekatan dengan unsur agama menjadikan kurang populernya karakter Presiden Jokowi di kalangan kelompok konservatif. Keterbelahan dan polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat dengan isu-isu agama sebagai porosnya makin menurunkan citra Presiden Jokowi. Kemudian tidak adanya muncul gagasan yang menjadi solusi terhadap persoalan yang terjadi menaikkan eskalasi permasalahan

semakin kompleks. Dampaknya adalah keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung kelompok konservatif di daerah-daerah yang menjadi tempat kekalahan Jokowi.

Hal tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh Mahfud MD yang menganalisis bahwa kekalahan Presiden Jokowi di beberapa daerah di latarbelakangi oleh aspek sejarah, seperti Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan (Afifiyah, 2017). Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa ada beberapa kejadian pada masa lalu yang di dasari unsur agama di daerah-daerah tersebut, seperti deklarasi DI/TII di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara di Sumatera Barat ada peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang walaupun bukan jenis pemberontakan bersifat agama, akan tetapi otak dari terciptanya peristiwa tersebut adalah kebanyakan dari anggota Partai Masyumi yang notabene partai Islam. Di tambah dengan dukungan sebagian besar para ulama pada lawan politik Presiden Jokowi, yakni Prabowo, menjadikan semakin melemahnya basis pemilih Jokowi, khususnya di Sumatera Barat. Kemudian fenomena ini menjadikan beberapa daerah tersebut diberikan julukan daerah Islam garis keras oleh Mahfud MD (Afifiyah, 2017).

Hal ini menjadikan kelompok konservatif tersebut menjadi kekuatan politik yang kuat dikarenakan memiliki banyaknya jumlah massa di dalamnya. Kekuatan politik yang massif tersebut pada dasarnya dapat menggerakkan mobilisasi massa yang tinggi. Konservatif merupakan pemikiran tradisional yang menganggap ideologi merupakan manifestasi dari arogansi rasionalisme, yang secara jelas menggambarkan adanya penolakan terhadap pembaharuan (Heywood, 2017). Kelompok konservatif

menganggap bahwa pikiran rasional adalah sesuatu yang jahat, karena menurut mereka manusia tidak membutuhkan pikiran rasional yang dapat merubah tatanan sosial.

Akan tetapi dalam partai politik kasus menguatnya konservatisme membuat politisi, dan calon politisi serta partai politik itu sendiri menjadi lebih terbuka terhadap kelompok-kelompok Islam baru karena ingin mendapat dukungan ketika berkompetisi di pemilu maupun pilkada. Hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Karena pengaruh konservatisme agama di Indonesia juga mempengaruhi pembuatan kebijakan di banyak lembaga pemerintahan. Sebagai contoh adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering menjadi rujukan untuk sistem pengadilan di Indonesia, walaupun sebenarnya fatwa bukan merupakan sumber hukum yang formal.

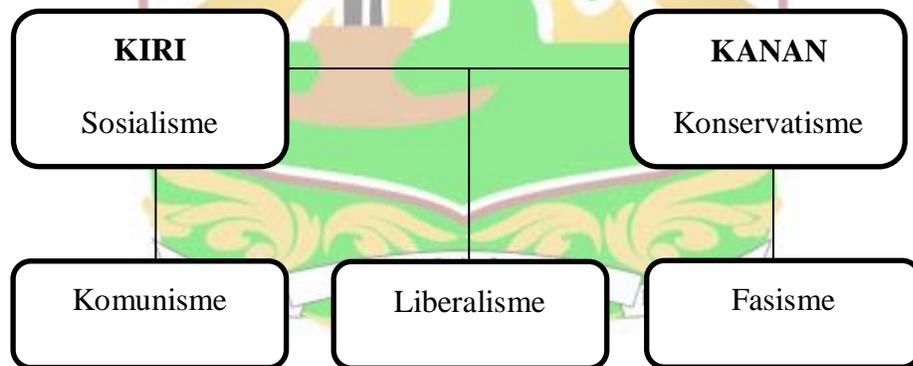
Di tengah konstelasi partai politik fakta bahwa krisis ideologi menjadi fenomena yang aneh terhadap seluruh elemen struktural dan fungsi partai politik (Gerald, 2019). Krisis ideologi ini akhirnya menyamakan spektrum ideologi bagi setiap partai di Indonesia. Kaburnya ideologi partai berdampak kepada koalisi-koalisi yang terbentuk menjadi koalisi yang pragmatis. Hal ini menyebabkan terpinggirkannya ideologi partai ketika menentukan langkah dalam berkoalisi. Dalam kondisi yang berkembang seperti itu, partai politik menjadi sangat pragmatis, dikarenakan tidak lagi melibatkan masalah ideologis yang ketat sehingga faktor perdebatan ideologi semakin mengikis dan kabur (Macridis, 1992). Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *“The End of History and The Last Man”*

(2006) yang mengatakan bahwa ideologi telah lama mati setelah kejatuhan komunisme Uni Soviet.

Terciptanya kekuatan yang tidak seimbang yang mana menjadikan partai-partai tertentu yang menguasai sumber daya dan memonopoli hal itu sehingga membentuk poros kekuatan di mana partai-partai lainnya yang tidak memiliki sumber daya akan mendekat dan bergabung. Hal inilah yang menyebabkan koalisi terbentuk bukan karena kesamaan ideologi dari masing-masing partai, tapi karena pragmatisme dengan salah satu alasannya yakni untuk bertahan hingga pemilu berikutnya (Aspinall, 2014). Lalu, apabila dicermati dari banyaknya tipe partai menandakan bahwa bermacam-macam kelas sosial disatukan oleh persamaan ideologi dalam suatu partai. Sementara masih terjaganya nilai-nilai budaya dan agama, maka ini menjadikan konservatif masih sesuai dengan unsur-unsur yang ada di Indonesia.

Akan tetapi jika melihat kompleksitas yang terjadi serta sejarah partai politik pemenang pemilu, spektrum ideologi yang berada di tengah-lah yang selalu menjadi pemenang. Kemudian pergeseran posisi ideologi sering digunakan oleh partai-partai politik tertentu guna menarik dukungan pemilih sebanyak-banyaknya. Fenomena ini seolah memperlihatkan kepada kita bahwa para elit di dalam partai politik tidak peduli dengan ideologi partai yang menjadi pondasi terpenting, dan lebih mengutamakan keuntungan pragmatisme jangka pendek semata (Heywood, 2017). Pergeseran ideologi ini terjadi hampir disetiap masa di Indonesia. Walaupun masing-masing partai memiliki beberapa landasan ideologis yang berbeda, akan tetapi untuk terciptanya koalisi antar partai tidak membutuhkan persamaan ideologi.

Ideologi yang memiliki kaitan dengan demokrasi juga akan memiliki dampak kepada sistem pemerintahan. Setiap negara memiliki model dan bentuk sistem pemerintahannya masing-masing yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada banyak negara di Eropa dan Amerika pada abad ke-19, yang memang banyak menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional ataupun demokrasi parlementer. Sementara di Indonesia bagaimana hubungan antara agama dengan negara menjadi penentu spektrum ideologi dari partai politik (Mayrudin, 2017). Lalu menyebabkan partai-partai Islam berada pada posisi kanan, sementara pada bagian kiri ditempati oleh partai-partai nasionalis. Lalu apabila melihat pembagian spektrum ideologi partai, maka Andrew Heywood dalam bukunya yang berjudul “*Politics*” (2019) menggambarkan spektrum tersebut sebagai berikut:



Bagan 1.1 Spektrum Ideologi

Sumber: Andrew Heywood. Politics (2019).

Pada awal terbentuknya partai politik maka saat itu pula penetapan ideologi menjadi salah satu aspek penentu terhadap kegiatan partai kedepannya maupun dalam

pencapaian tujuannya (Firmanzah, 2010). Ideologi konservatif dengan spektrum yang berada di kanan memiliki perbedaan yang kontras dengan demokrasi yang merupakan turunan dari konsep liberalisme yang berada pada spektrum tengah (Heywood, 2019). Partai Islam di Indonesia berada pada spektrum kanan, yang mana merupakan bagian dari ideologi konservatisme, sehingga hal inilah yang menjadikan bahwa konservatisme di Indonesia berkaitan erat dengan unsur agama terutama Islam. Walaupun dengan jumlah partai politik yang banyak di Indonesia, tidak menjamin bahwa partai-partai tersebut memiliki perbedaan ideologi, jikapun ada perbedaan, hal itu tidak terlalu mencolok dan hanya diberi ruang pemisah antara “Partai Islam” dan “Partai Nasionalis”. Tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap ideologi-ideologi partai di Indonesia adalah disebabkan kurang populernya partai dengan spektrum yang “terlalu kiri” ataupun “terlalu kanan”.

Beberapa studi penelitian terdahulu mengkaji fenomena keterkaitan konservatisme dan ideologi partai-partai Islam serta dinamika politiknya. Hal ini yang kemudian menjadikan fokus kajian dari penelitian sebelumnya akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang memiliki kaitan dengan ideologi konservatif Islam sesuai dengan yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya yakni; Pertama, kekuatan dan strategi partai politik Islam pada pemilu, yang berdampak pada penentuan koalisi partai Islam, kekalahan partai-partai Islam dalam setiap pemilu, politik identitas yang dimainkan oleh partai-partai Islam serta, kelembagaan partai Islam seperti yang dilakukan Addiansyah, 2019; Riyanto, 2020; Mayrudin & Akbar, 2019; Sandhi, 2014; Shobron, 2013; Hamayotsu, 2011, yang mana dalam kajian-kajian

tersebut menyatakan bahwa partai-partai Islam memusatkan kekuatan politiknya cenderung kepada pragmatisme yang dibentuk dengan memainkan peranan politik identitas.

Kedua, peranan partai Islam dalam pemerintahan yang berdampak kepada kebijakan-kebijakan partai Islam dan dinamikanya, seperti permasalahan proses dan perancangan implementasi perda-perda syariah, serta kaitan Islam dan Pancasila di era reformasi seperti yang dikaji oleh Jati, 2013; Guyanie & Tamtowi, 2021; Nubowo, 2015, yang membahas bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi antara partai-partai Islam dengan pemerintahan serta kendala yang dialami oleh partai Islam terhadap kebijakan-kebijakan yang akan disahkan.

Namun, dari penelitian-penelitian terdahulu ini tidak ada yang membahas bagaimana sosio kultural masyarakat Indonesia yang mempengaruhi substansi dari ideologi konservatif yang memiliki kaitan erat dengan agama Islam serta permasalahannya dengan sistem demokrasi baik secara spektrum ideologi maupun melalui teori dan implementasi dalam realita kehidupan sosial. Tantangan berdemokrasi dalam bernegara pun menjadi kompleks ketika demokrasi memiliki permasalahan terhadap ideologi konservatif secara spektrum dan prinsip, sehingga menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, mengingat ideologi konservatif di Indonesia relevan dengan Islam, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam. Kemudian mengkaji bagaimana dinamika partai-partai Islam konservatif sebagai salah satu instrumen demokrasi akan mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Ideologi pada saat sekarang ini menjadi suatu komponen yang terabaikan, hal ini terlihat bagaimana partai politik tidak memiliki perbedaan yang mendasar selain dari perbedaan antara “Partai Nasionalis” dengan “Partai Islam”. Kemudian dalam setiap pemilu di Indonesia, yang mana partai politik dengan haluan tengah selalu menjadi pemenang. Fenomena ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran ideologi terhadap kesempatan menang bagi masing-masing posisi pada spektrum ideologi tersebut yaitu koalisi partai politik. Partai yang baru dibentuk-pun biasanya akan cenderung pada spektrum tengah. Bahkan partai-partai lama yang berada pada spektrum kiri maupun kanan, akan beradaptasi sedikit demi sedikit dan pada akhirnya akan juga tertarik kepada posisi spektrum tengah. Inilah yang kemudian membuat perbedaan ideologi antar partai politik di Indonesia menjadi samar.

Kendati biasanya bentuk ideologi dalam tubuh partai politik, akan tetapi ideologi konservatif masih dapat ditemukan dalam melalui beberapa tipe dan ciri dalam partai politik di Indonesia. Konservatisme yang didasari dengan pemikiran mempertahankan tradisi yang sudah ada, menyebabkan definisi konservatisme menjadi lekat dengan unsur agama dan budaya, sehingga partai yang berlandaskan agama di Indonesia menjadi partai yang dikategorikan ke dalam partai konservatif. Hal ini terlihat dari fakta sejarah konservatisme di Indonesia lahir sebagai gerakan konservatisme agama yang menentang penjajahan Belanda. Menekankan konsepsi agama sebagai landasan utama yang melahirkan kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU),

Muhammadiyah dan Masyumi (Leifer, 2001). Namun kemudian bentuk ideologi konservatif itu sendiri mendapat tantangan dalam kehidupan berdemokrasi.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan memiliki massa yang banyak, hal ini tidak serta-merta menjamin kemenangan partai islam disetiap kontestasi pemilu. Demokratisasi yang diterapkan dalam kontestasi elektoral pertama di Indonesia pada Tahun 1955 membuktikan bahwa perolehan suara tertinggi dari partai Islam Masyumi dan NU hanya meraih 44% (Sandhi, 2014). Serta pada pemilu Tahun 1999 ketika rezim otoriter tumbang beralih kepada sistem demokrasi, sekitar 181 partai politik terbentuk sementara 42 partai merupakan partai yang berazaskan dan memiliki simbol Islam serta memainkan politik identitas keagamaan dengan memanfaatkan aspek mayoritas (Sandhi, 2014). Di tengah era demokrasi yang memiliki sistem yang sangat dinamis dan progresif, konservatisme menjadi sesuatu yang berlawanan dengan konsep tersebut. Hal inilah menjadi salah satu aspek yang membuat partai-partai Islam memiliki progres yang *stagnant*. Berikut di bawah ini adalah tabel yang memperlihatkan hasil pemilu antara Partai Nasionalis vs Partai Islam dari awal pemilu hingga pemilu yang terakhir:

Tabel 1.1 Perbandingan Persentase Perolehan Suara Partai Islam vs Partai Nasionalis Pada Pemilu 1955 s/d 2019

No.	Ideologi Partai Politik	Pemilu 1955	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Partai Islam	43,7%	36,8%	38,1%	29,2%	31,4%	29,74%
2.	Partai Nasionalis	51,7%	62,3%	59,5%	70,8%	68,6%	70,26%

Sumber: Skala Survei Indonesia (SSI) dan data KPU yang diambil pada Tahun 2022

Ciri khas dari ideologi konservatif yang memelihara adat atau kebiasaan mereka, menjadikan mereka menolak hal-hal yang merubah kebiasaan tersebut. Kebiasaan ini cenderung ditemukan dalam konsep keagamaan, terutama agama Islam, yang mana agama selalu meyakini serta memegang teguh apa yang menjadi sumber hukumnya, yakni Al-Quran dan Hadits, yang mana hal ini mengikat bagi seluruh pemeluknya (Addiansyah, 2019). Partai Islam biasanya memiliki konsep menolak denominasi/doktrin serta tradisi tertentu, karena Partai Islam itu sendiri telah memiliki program dan kegiatan yang sangat didominasi oleh doktrin Islam (Riyanto, 2020). Sementara dalam negara demokrasi melaksanakan pengambilan keputusan yang prosesnya harus melibatkan peran masyarakat (Dahlan, 2019). Akan tetapi partai Islam saat ini bersikap lebih pragmatis, sehingga dengan kondisi seperti itu tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam secara penuh.

Asumsi dari beberapa faktor yang mempengaruhi pragmatisme partai Islam yaitu; (1) untuk merebut suara sebanyak mungkin dari seluruh kalangan masyarakat sewaktu pemilu; (2) menghilangkan sekat segmentasi pemilih dengan memainkan isu-isu populis agar bisa bersaing dengan partai non agama; (3) untuk mendapatkan kekuasaan yang dilakukan secara transaksional, pada akhirnya transaksi politik dilakukan untuk memberikan pertukaran kekuasaan pada elit-elit partai Islam untuk menempati jabatan tertentu. Sementara lemahnya kekuatan partai Islam di tengah mayoritas masyarakat Muslim menjadi sebuah anomali, yang kemudian hal tersebut masih menjadi perbincangan dikalangan akademisi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan selain dari untuk melihat dan menjabarkan tentang ideologi konservatif yang

memiliki keterkaitan dengan agama Islam di Indonesia, serta menganalisis hubungan dan pengaruhnya terhadap sistem demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Ziblatt terhadap partai konservatif di Perancis dan Jerman yang dikatakan dalam bukunya yang berjudul “*Conservative Parties and The Birth of Democracy*” (2017) bahwa partai konservatif apabila menguat, maka mereka memiliki peran dalam memajukan demokrasi, namun jadi penghambat ketika partai itu melemah. Pergeseran nilai konservatisme khususnya pada wilayah Eropa bagian barat di Tahun 80-an yang akhirnya mendasari kesimpulan Ziblatt tersebut. Sementara ideologi konservatif apabila melihat sosio kultural di Indonesia akan merujuk kepada ideologi Islam. Pada setiap proses politik di Indonesia partai Islam memiliki banyak massa namun untuk di tingkat nasional cenderung susah untuk memenangkan kontestasi elektoral (Shobron, 2013). Namun di Indonesia khususnya di beberapa daerah, partai Islam memiliki prinsip yang sejalan dengan demokrasi melihat bagaimana perda-perda berbasis syariah menjadi ketetapan hukum, sehingga ada kecenderungan bahwa partai-partai Islam menjadi bagian dari demokrasi dengan mewujudkan salah satu prinsip demokrasi, yakni *majority wins*.

Setelah melihat bagaimana definisi konservatisme secara substansial serta dipengaruhi oleh sosio kultural masyarakat Indonesia yang esensinya memiliki kedekatan dengan unsur religiusitas, menyebabkan nilai-nilai konservatisme koheren dengan nilai-nilai agama. Lalu tatanan sosial yang memiliki landasan kuat yang bersandar pada norma-norma agama dan kepatuhan mutlak pada Tuhan, menjadikan perilaku dan interaksi sosial di bawah ideologi konservatisme memiliki nilai-nilai ideal

yang mapan dalam menata kehidupan masyarakat (Surbakti, 2005). Oleh karenanya penelitian ini memiliki asumsi bahwa partai politik dengan ideologi konservatif sebagai salah satu instrumen penyokong demokrasi di Indonesia memiliki posisi yang pragmatis tergantung kepada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni sosio kultural, isu yang dimainkan, arah kebijakan dan aspek historis.

Jika dikaitkan permasalahan antara Islam dengan demokrasi dalam pandangan bernegara dan hukum-hukum yang mengaturnya, maka terdapat perbedaan kontras terhadap prinsip-prinsip bernegara tersebut, contohnya seperti tata cara dalam memilih pemimpin, kemudian perbedaan sumber-sumber hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban, serta dalam menjalankan pemerintahan. Namun, melihat konsep demokrasi yang mementingkan suara mayoritas, maka Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam telah memenuhi syarat dari jalannya demokratisasi dengan lahirnya peraturan yang bersumber dari beberapa hukum agama Islam, seperti lahirnya perda berbasis syariah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah pada akhirnya memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dimainkan oleh partai-partai ideologi konservatif dalam mempengaruhi pasang surutnya demokrasi, dengan menegakkan nilai-nilai konservatisme yang secara spektrum politik cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan Islam yang secara posisi ada dibagian kanan spektrum dan masuk ke dalam bagian dari konservatisme terhadap demokrasi yang merupakan turunan dari liberalisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Menjabarkan dan menjelaskan masing-masing posisi ideologi partai serta peran yang dimainkan oleh partai-partai tersebut berdasarkan penentuan posisi ideologinya, serta dampaknya terhadap pasang surut demokrasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini berkontribusi dengan memberikan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji persoalan ideologi maupun spektrum politik di Indonesia, dengan menjelaskan definisi ideologi secara komprehensif serta menjabarkan dan menjelaskan posisi spektrum dari berbagai ideologi yang digunakan di Indonesia. Kemudian mengelompokannya dengan variabel khusus dan data yang telah dikumpulkan.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran memberikan wawasan baru terhadap kajian spektrum ideologi bagi penulis serta menjadi masukan bagi partai politik mengenai persoalan ideologi dan penjabaran-penjabarannya agar partai politik menyandarkan segala sesuatu berdasarkan ideologinya. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah khazanah terhadap kepustakaan ilmu politik di Indonesia.

